



Implikasi Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter Terhadap Pengelolaan Pembelajaran SD

Ria Norfika Yuliandari¹, Syamsul Hadi²

¹PGMI, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jl. Gajayana No. 50, Malang, Jawa Timur

²Pendidikan Dasar, Pascasarjana Universitas Negeri Malang

surel: fkachu_math@pgmi.uin-malang.ac.id¹, syamsulhadi.mhs@gmail.com²

ABSTRAK

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter merupakan salah satu kebijakan merdeka belajar yang digagas oleh Mendikbud yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Muatan penilaian dalam kebijakan tersebut meliputi literasi dan numerasi. Memang bukan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan kita, namun dalam implementasinya selama ini belum optimal. Sehingga perlu adanya perbaikan pada tata kelola pembelajaran di sekolah dasar agar dapat menyukseskan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan AKM dan Survei Karakter serta mendeskripsikan implikasi kebijakan tersebut terhadap tata kelola pembelajaran di Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan studi *literature*. Hasil dari pembahasan ini adalah bahwa literasi dan numerasi serta karakter sebagai muatan materi dalam kebijakan tersebut ini bukanlah sesuatu yang baru dalam pendidikan kita. Namun, mungkin implementasi nya saja yang masih belum optimal. Untuk itu perlu adanya perbaikan pada tata kelola pembelajaran yang salah satunya adalah melalui pendidikan holistic dimana pendidikan harus dapat mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara harmonis yang meliputi potensi intelektual pada aspek kognitif, emosional, fisik, sosial dan estetika sebagai aspek afektif. Selanjutnya, pembelajaran dapat dilakukan melalui strategi pemecahan masalah dengan menerapkan pembelajaran dengan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang dapat dimodifikasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya. Pembelajaran dengan berbasis pemecahan masalah ini dinilai dapat mengembangkan ketrampilan literasi dan numerasi siswa. Agar tata kelola pembelajaran dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya peran aktif kepala sekolah sebagai manajer yang memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan supervise terhadap kinerja guru. Dengan peran aktif kepala sekolah diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

Kata Kunci: Implikasi, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, tata kelola pembelajaran.

ABSTRACT

Minimum competency assessment and character survey are two of the freedom to learn policies that are formulated by the Ministry of Education and Culture. They aim to improve the quality of education in Indonesia. The assessment content of these policies includes literacy and numeracy. These policies are not new in our education, but their implementations are not so optimal that improvement in elementary school learning management is necessary in succeeding the policies. This research aims to analyze minimum competency assessment and character survey policies and describe the implications of those policies in the elementary school learning management. This research is a literature study. The result of this study shows that literacy, numeracy and character as the assessment content of those policies are not new in our education. However, the implementation is not optimal yet. Thus, it is necessary to improve the learning management through holistic education in which education needs to be able to develop students' potential harmoniously including intellectual potential in cognitive, emotional, physical, social and aesthetic aspects as an affective aspect. Furthermore, learning can be conducted with a problem solving strategy by applying Higher Order Thinking Skills (HOTS) that can be modified by integrating character values. Problem solving based learning is considered able to develop students' literacy and numeracy skills. In order to succeed the learning management, headmasters, who have full authority in supervising teachers' performances, need to get actively involved. It then can create off high quality education.

Keywords: *Implication, minimum competency assessment, character survey, learning management*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencetak dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, di Indonesia, mewajibkan semua warga negaranya untuk mengikuti program pemerintah wajib belajar minimal 9 tahun yang terdiri dari enam tahun pada sekolah dasar dan tiga tahun pada sekolah menengah pertama. Hal ini,

sesuai dengan Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah".¹

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih mempunyai beberapa masalah besar dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan

¹ UU Sisdiknas, "Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003.

kualitas pendidikan. Salah satu isu permasalahan dalam dunia pendidikan kita adalah Ujian Nasional atau disingkat UN. Menurut Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Sisdiknas, UN merupakan alat untuk evaluasi hasil belajar yang harusnya dilakukan sendiri oleh pendidik terhadap peserta didiknya dengan tujuan memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Namun dalam penerapannya, kewenangan guru/pendidik tersebut di rampas oleh pemerintah. Masih terkait dengan evaluasi, UN akhirnya hanya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik saja, padahal di dalam pasal 57 Ayat (2) UU Sisdiknas dituliskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap peserta didik, tetapi juga terhadap lembaga dan program pendidikan.

Selain hal tersebut, terdapat beberapa kritik terhadap UN. Yang pertama adalah adanya ketentuan bahwa UN sebagai penentu kelulusan siswa secara nasional, sedangkan kenyataannya semua siswa dan sekolah di Indonesia masih belum memiliki kualitas yang sama.² Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip kemajemukan dalam pendidikan yang dijelaskan pada pasal 36 Ayat (2) UU Sisdiknas 2003, dimana satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik tentunya akan berbeda pada setiap daerah. Kedua, UN hanya mengukur aspek

kognitif saja, dan mengabaikan aspek lainnya yaitu aspek afektif dan psikomotorik. Lagi-lagi hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam pasal 35 Ayat (1) UU Sisdiknas 2003 dimana terdapat tiga aspek untuk mengukur kompetensi lulusan yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh sebab itu, kebijakan UN seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kompetensi peserta didik dan mutu pendidikan karena hanya mengukur salah satu aspek saja.

Selain hal-hal yang mendasar seperti di atas, hal-hal teknis pun mewarnai permasalahan UN. Diantaranya kesiapan dalam hal pendistribusian naskah ujian yang terkendala sehingga UN tidak dapat dilakukan secara serentak di Indonesia.³ Kesiapan sekolah dan peserta didik juga menjadi perhatian utama dalam hal ini. Nasib peserta didik seolah-olah hanya dipertaruhkan selama tiga hari saja. Tentunya hal ini secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi peserta didik, guru dan sekolah.

Selama ini UN dinilai masih memberikan dampak psikologi, fisik, maupun persepsual sehingga peserta didik mengalami stress dalam belajar. Stress dalam belajar ini diakibatkan adanya tekanan dan tuntutan yang harus dipenuhi peserta didik demi mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini dapat memunculkan dampak lainnya yaitu terkait dengan moral. Ujian Nasional dapat

² Suke Silverius et al., "Dampak Psikologi, Fisik, Dan Persepsual Siswa Dalam Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2010): 194, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.446>.

³ Nurul Hidayah, "Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik" 7, no. 1 (2013): 35-40, <https://doi.org/10.13170/jp.7.1.2053>.

melemahkan moral dan motivasi siswa dalam belajar karena dalam pelaksanaannya ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan.⁴ Misalnya, isu kebocoran soal dan kunci jawaban yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Permasalahan-permasalahan seperti ini seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah dan sekolah yang harus lebih memperhatikan kesiapan peserta didik dalam hal fisik dan mental dalam menghadapi UN.

Sampai ketika dilantiknya Nadiem Makariem sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan periode 2019-2024 yang melahirkan kebijakan baru yang dinamakan “merdeka belajar”. Kebijakan ini didasari oleh arahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait peningkatan kualitas pada sumber daya manusia (SDM). Nadiem Makariem menetapkan empat pokok kebijakan merdeka belajar. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia⁵, kebijakan pertama yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau disingkat USBN. Masih dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem Makariem menjelaskan bahwa arah kebijakan baru USBN terkait dengan penyelenggaraannya. Pada tahun 2020, USBN akan diselenggarakan hanya oleh sekolah untuk menilai kompetensi siswa yang dilakukan dalam bentuk penilaian yang lebih komprehensif. Hal ini dengan tujuan agar

sekolah lebih bebas atau merdeka dalam penilaian hasil belajar siswanya sendiri. Kebijakan kedua yaitu mengenai Ujian Nasional. Nadiem Makariem menyebutkan bahwa tahun 2020 akan menjadi pelaksanaan UN yang terakhir. Penyelenggaraan UN pada tahun 2021 akan di ganti dengan AKM dan Survei Karakter. Asesmen ini terdiri dari kemampuan literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter.

Kebijakan merdeka belajar yang ketiga adalah terkait penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru dapat memilih dan mengembangkan sendiri format RPP yang akan digunakan didasarkan pada tiga komponen inti yaitu tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penyederhanaan RPP ini bertujuan agar guru lebih banyak memiliki waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses belajar daripada harus disibukkan dalam pembuatan RPP yang panjang. Terakhir adalah kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan ini merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya mengenai sistem zonasi. Sistem zonasi pada kebijakan yang baru lebih fleksibel dengan komposisi PPDB yang lebih diperluas dengan tujuan mengurangi kesenjangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Dan, daerah di berikan kewenangan untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

⁴ Ni Ketut and Srie Kusuma, “Dampak Pelaksanaan Ujian Nasional Terhadap Motivasi Belajar, Moral Siswa Dan Eksistensi Guru,” no. 2 (2017): 77-87.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, “Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan ‘Merdeka Belajar,’” *Www.Kemdikbud.Go.Id*, 2020, 2019-20.

Tujuan dan arah kebijakan merdeka belajar yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan, sehingga pemerintah pusat dan daerah tentunya harus dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, harus ada kematangan persiapan agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai harapan. Salah satu kebijakan yang membutuhkan perhatian lebih adalah AKM dan Survei Karakter. Sebagai pengganti UN, penilaian ini terdiri dari dua aspek yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sistem AKM ini akan menilai dua aspek kognitif yaitu literasi dan numerasi. Menurut Mendikbud, dalam materi literasi akan menekankan pada kemampuan pemahaman dan kemampuan menganalisis bacaan. Jadi tidak hanya sekedar dapat membaca, tetapi juga harus mampu untuk mengerti dan memahami konsep dibalik bacaan atau tulisan tersebut.⁶

Berikutnya, pada materi numerasi akan menekankan pada kemampuan menganalisis angka-angka. Numerasi ini berbeda dengan pengetahuan matematika. Secara sederhana numerasi merupakan keterampilan untuk menerapkan pengetahuan matematika seperti konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung serta menginterpretasikan informasi kuantitatif di dalam kehidupan nyata. Contoh sederhana adalah ketika siswa dalam satu kelas yang terdiri dari 28 siswa ingin pergi bertamasya ke suatu

tempat. Untuk pergi ke tempat tersebut menyewa mobil beserta sopirnya mobil. Mobil hanya dapat memuat 6 siswa. jadi berapa mobil yang diperlukan? Berdasarkan pengetahuan matematika, penyelesaiannya mungkin dengan $28 : 6 = 4,666$. Tetapi dengan kemampuan numerasi maka mobil yang diperlukan sebanyak 5 mobil karena tidak mungkin akan menyewa mobil sebanyak 4,666. Sedangkan untuk survei karakter, Mendikbud berpendapat bahwa survei ini tidak berupa tes, tetapi akan dirancang sedemikian rupa supaya dapat mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa.⁷

Berdasarkan hasil survei, selama ini materi UN dianggap terlalu padat untuk siswa dan materinya pun lebih banyak mengarah pada kemampuan hafalan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya terdapat dua poin penting yang membedakan dengan UN sebelumnya. Yang pertama muatan materi AKM dan survei karakter tidak hanya menilai aspek kognitif saja seperti UN, tapi juga akan menilai aspek afektif dengan survei karakter. Kedua, AKM dan survei karakter akan dilakukan siswa pada pertengahan jenjang satuan pendidikan, yaitu pada kelas 4, 8 dan 11, sehingga pihak sekolah mempunyai kesempatan untuk memperbaiki mutu pembelajaran selanjutnya. Ketiga, hasil dari ujian ini tidak akan dijadikan dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Dengan skema pelaksanaan kebijakan tersebut dan kondisi

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

pendidikan kita saat ini wajar jika muncul pertanyaan, apakah guru-guru kita siap dengan kebijakan tersebut? Apakah sekolah-sekolah siap dalam menghadapi tantangan kebijakan tersebut? Tentunya, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus mempersiapkan tata kelola pembelajaran yang menunjang kebijakan tersebut. Perbaikan pada tata kelola pembelajaran akan menjadi satu hal utama yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Diharapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran harus bermuatan materi dan kegiatan yang dapat mengembangkan ketreampilan literasi dan numerasi serta penguatan karakter siswa. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter serta menganalisis implikasi dari kebijakan tersebut dalam tata kelola pembelajaran di Sekolah Dasar.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka atau yang biasa disebut studi literatur. Sumber pengkajian didapatkan dari artikel dan buku yang terkait, serta penelitian-penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Selanjutnya, berbagai sumber yang telah dikumpulkan akan

dianalisis, didiskusikan dan disarikan dan kemudian disusun dalam bentuk laporan artikel. Studi literatur adalah studi kepustakaan yang dilakukan hanya berdasar karya tertulis, baik hasil penelitian yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum.⁸ Hal ini berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari berbagai rujukan melalui beberapa buku, majalah yang berkaitan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter.

Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu proses yang digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.⁹ Salah satunya adalah pengambilan kebijakan dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sektor publik yang harus dikelola secara serius karena merupakan prioritas dalam program pembangunan.¹⁰ Apalagi di era globalisasi yang sangat pesat seperti saat ini, sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu.¹¹ Berbagai kebijakan pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi pembuatan kebijakan membutuhkan

⁸ Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," *Studi Litelatur*, 2017, 1-3.

⁹ Nicola A. Alexander, *Policy Analysis For Educational Leaders* (United State, 2009).

¹⁰ Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik," *Jurnal MEDTEK 2*, no. April (2010): 1-13.

¹¹ A. Lin Goodwin, "Globalization and the Preparation of Quality Teachers: Rethinking Knowledge Domains for Teaching," *Teaching Education* 21, no. 1 (2010): 19-32, <https://doi.org/10.1080/10476210903466901>.

kemampuan analisa yang mendasar.¹² Hal ini dapat kita lihat dari dikeluarkannya kebijakan baru yang didasarkan pada analisa kebijakan sebelumnya. Analisa ini didasarkan pada kebutuhan pada kehidupan nyata.

Salah satunya adalah kebijakan merdeka belajar yang meliputi AKM dan Survei Karakter. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai pengganti UN yang selama ini dijadikan evaluasi satuan pendidikan secara nasional. Dalam skemanya, Asesmen Kompetensi Minimum akan mempunyai dua materi untuk aspek kognitif, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Sedangkan untuk aspek afektif dengan menggunakan survei karakter untuk mengukur karakter siswa. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di kancah internasional.

Aspek kognitif pertama yang akan dinilai adalah literasi. Definisi literasi adalah sebagai berikut:

*Literacy is defined as a particular capacity and mode of behavior: the ability to understand and employ printed information in daily activities, at home, at work and in the community – to achieve one's goals, and to develop one's knowledge and potential.*¹³

Dari definisi tersebut, literasi merupakan kemampuan dan cara perilaku tertentu yang meliputi keterampilan untuk

memahami dan menggunakan informasi cetak dalam kegiatan sehari-hari di sekitar kita misal di rumah, di tempat kerja dan di masyarakat, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Jadi, literasi di sini berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Definisi ini senada dengan definisi literasi Kemendikbud, bahwa literasi adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, menelusuri, mengolah informasi, menganalisis, memberikan tanggapan, serta menggunakan teks tertulis di lingkungan sosial. Jika kita telaah dari definisi tersebut, literasi tidak hanya kemampuan bisa membaca dan menulis saja, tetapi lebih mengarah bagaimana kecakapan dan keterampilan tersebut dapat digunakan dalam penyelesaian masalah di kehidupan nyata.¹⁴

Sebenarnya, literasi bukan merupakan hal yang baru di dunia pendidikan kita. Bahkan Kemendikbud telah mengeluarkan Buku Literasi Numerasi pada tahun 2017, yang berjudul Materi Pendukung Literasi Numerasi sebagai pendukung kebijakan literasi nasional yang dikeluarkan pada tahun 2016 silam. Ini sebagai bukti bahwa Kemendikbud serius untuk mengembangkan kemampuan literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup di abad ke-21. Terdapat enam literasi dasar yang diharapkan harus dikuasai oleh

¹² Deborah Stone, *Policy Paradox*, Third Edit (New York London: Norton & Company, 2012).

¹³ Nicolas Jonas, "Numeracy Practices and Numeracy Skills among Adults," *OECD Education Working Paper No. 177*, no. 177 (2018), <https://doi.org/10.1787/8f19fc9f-en>.

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Materi Pendukung Literasi Numerasi," *Gerakan Literasi Nasional* 53, no. 9 (2017): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

semua warga negara, salah satunya adalah literasi baca tulis yang selama ini digalakkan melalui program Gerakan Literasi Sekolah. Sudah banyak sekolah yang mengimplementasikan gerakan literasi ini melalui kegiatan pembiasaan membaca dan menulis serta menciptakan lingkungan sekolah yang kaya akan teks¹⁵ serta mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung di sekolah seperti perpustakaan.¹⁶

Namun dalam implementasinya, tidak semua pelaksanaan gerakan literasi ini terlaksana dengan optimal, kurangnya dukungan fasilitas berupa terbatasnya koleksi buku bacaan menjadi salah satu kendala keterlaksanaan gerakan literasi di sekolah¹⁷ serta kurangnya gairah dan motivasi dalam membaca.¹⁸ Jika kebijakan asesmen kompetensi minimum literasi ini benar-benar akan dilaksanakan, maka tidak lagi hanya kegiatan pembiasaan literasi saja yang perlu diterapkan kepada peserta didik, karena literasi ini akan dinilai sehingga literasi perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran di kelas. Terkait dengan hal tersebut kendala lain yang muncul adalah kurangnya kekreatifan

guru dalam mengelola pembelajaran dan menyusun penugasan. Menurut Suyono,¹⁹ inti kegiatan literasi yaitu membaca, berfikir dan menulis. Sehingga dalam penugasan seharusnya memperhatikan inti literasi tersebut tetapi tetap diperhatikan peruntukannya untuk jenjang kelas tertentu. Jika kita perhatikan banyak pola yang dapat digunakan dalam penugasan literasi yang terdapat pada buku tematik.²⁰

Selanjutnya, aspek kognitif kedua yaitu numerasi. Numerasi merupakan kemampuan, kepercayaan diri dan kemauan untuk melibatkan informasi kuantitatif dan spasial untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Sehingga kemampuan numerasi terdiri dari tiga aspek yaitu (1) keterampilan dan pengetahuan matematika, (2) pemahaman situasi dan konteks, serta (3) kepercayaan diri, kemauan, kesadaran dan lainnya.²¹ Dengan kata lain, kemampuan numerasi adalah kemampuan menerapkan pengetahuan matematika di kehidupan

¹⁵ Indah Wijaya Antasari, "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Tahap Pembiasaan" 9, no. 1 (2017): 367-73; Gheanurma Ekahasta Novarina and Anang Santoso, "Model Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, no. 2016 (2019): 1448-56.

¹⁶ L. Hidayah, "Implementasi Budaya Literasi Di Sekolah Dasar Melalui Optimalisasi Perpustakaan: Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri Di Surabaya," *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 1, no. 2 (2017): 48-58.

¹⁷ Retno Shoimah Nuzilatus, "Implementasi Gerakan Literasi Di Sekolah (Studi Kasus Di SDN Karah 1 Suarabaya)," *Jurnal Pendidikan Dasar Islam Mida* 1, no. 2 (2008).

¹⁸ Muhammad Hilal Hidayat, Imam Agus Basuki, and Sa Akbar, "Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, no. 2017 (2018): 810-17.

¹⁹ Suyono, "Pembelajaran Efektif Dan Produktif Berbasis Literasi: Analisis Konteks, Prinsip, Dan Wujud Alternatif Strategi Implementasinya Di Sekolah," *Bahasa Dan Seni* 37, no. 2 (2009): 203-17.

²⁰ Suyono, Titik Harsiati, and Ika Sari Wulandari, "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Pada Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar," *Jippsd* 2, no. 1 (2014): 116-23.

²¹ Alberta Government, "Why Is Numeracy so Important?," 2013.

sehari-hari.²² Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,²³ numerasi merupakan keterampilan menerapkan konsep bilangan dan operasi hitung di dalam membantu menyelesaikan masalah di kehidupan nyata serta keterampilan menginterpretasikan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Yang termasuk ke dalam komponen numerasi antara lain yaitu bilangan, geometri dan pengukuran serta aljabar. Selanjutnya terdapat empat konten numerasi yaitu rumah, lingkungan kerja, kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara serta pembelajaran lebih lanjut.²⁴

Lalu mengapa literasi dan numerasi dinilai sangat penting? Hal ini karena kemampuan dan keterampilan menggunakan angka, data dan simbol matematika dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia sehari-hari. Sebagian besar aktifitas kita dalam kehidupan sehari-hari melibatkan kegiatan literasi, numerasi maupun karakter. Namun sayangnya, tidak banyak dari kita yang memanfaatkan keterampilan tersebut. Mungkin saja penguasaan konsep matematika sudah tidak diragukan lagi tapi pengaplikasian konsep tersebut dalam situasi permasalahan nyata yang tidak terstruktur masih sering diabaikan. Hal ini terlihat dari rendahnya skor penilaian kemampuan matematika pada PISA

menjadi dasar permasalahan dikeluarkannya kebijakan numerasi ini. Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 78 negara yang mengikuti OECD. Peringkat yang sama untuk kemampuan membaca di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian Mendikbud bahwa kemampuan numerasi siswa di Indonesia masih rendah. Hal ini diduga karena pendidikan kita selama ini masih berfokus pada Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sehingga pembelajaran pun masih terkesan hafalan. Selain itu, pembelajaran selama ini mengabaikan hal yang jauh lebih penting yaitu pembelajaran bermakna yang menjembatani konsep yang diajarkan di sekolah serta penerapannya dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Oleh sebab itu, guru sebagai kunci utama dalam pembelajaran diharapkan betul-betul memahami betul bahwa numerasi itu bukan hanya mengenai berhitung dengan menggunakan rumus tetapi juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus menguasai keterampilan numerasi dengan berbagai macam konteks serta harus lihai dalam memanfaatkan berbagai konteks untuk memampukan siswa dalam numerasi.²⁵ Oleh sebab itu, guru harus mengubah pola pembelajaran di kelas agar numerasi ini dapat tersampaikan dengan maksimal kepada peserta didik. Dari pembelajaran yang hanya

²² Alex W Neill, "The Essentials of Numeracy," *New Zealand Association for Research in Education*, no. 1973 (2001); Alberta Government, "Why Is Numeracy so Important?"

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Materi Pendukung Literasi Numerasi."

²⁴ L Ginsburg, M Manly, and MJ Schmitt, "The Components of Numeracy. NCSALL Occasional Paper.," *National Center for the Study of Adult ...*, no. December (2006).

²⁵ Ginsburg, Manly, and Schmitt.

memprioritaskan pengetahuan prosedural menjadi pembelajaran yang bersifat pemahaman konseptual.

Selain itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk optimalisasi implementasi kebijakan tersebut melalui pelatihan maupun workshop yang dapat dilakukan oleh LPTK. Pihak lain yang terkait misal keluarga dan lingkungan juga diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam kegiatan berhitung.²⁶ Australia yang sudah lebih dahulu menerapkan kurikulum numerasi menemukan bahwa peran orang tua merupakan tantangan tersendiri dalam pengembangan program numerasi,²⁷ sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua.

Tidak hanya dua kemampuan tersebut yang akan dinilai, tetapi agar penilaian tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional, maka unsur karakter tidak dapat dikesampingkan. Penguatan karakter ini juga bukan sesuai yang baru dalam pendidikan kita, tapi dalam implementasinya juga masih belum optimal. Dalam implementasinya, pendidikan karakter ini tidak berupa mata

pelajaran tersendiri dan bukan juga berupa tambahan pada SK maupun KD tetapi dalam bentuk integrasi ke dalam mata pelajaran, muatan lokal serta pengembangan diri.²⁸ Survei karakter akan menjadi pelengkap dalam asesmen ini untuk menilai aspek afektif. Pendidikan karakter diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kedua materi literasi dan numerasi. Tentu saja tidak akan lepas dari konteks dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan karakter tidak hanya dapat diberikan melalui ranah kognitif saja tetapi juga harus pada penerapan dan pengalaman kehidupan nyata peserta didik di sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Dalam survei karakter ini yang menjadi fokus adalah karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa. Mendikbud menjelaskan bahwa survei karakter ini adalah program bukan melalui tes, tetapi mengukur dan mengetahui karakter secara personal dan pemahaman mengenai pandangan kebangsaan seperti makna gotong royong dan Bhineka Tunggal Ika.

Selanjutnya, untuk penyelenggaraannya direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang.

²⁶ Eliane Segers, Tijs Kleemans, and Ludo Verhoeven, "Role of Parent Literacy and Numeracy Expectations and Activities in Predicting Early Numeracy Skills," *Mathematical Thinking and Learning* 17, no. 2-3 (2015): 219-36, <https://doi.org/10.1080/10986065.2015.1016819>.

²⁷ Christina E. Van Kraayenoord and John Elkins, "Learning Difficulties in Numeracy in Australia," *Journal of Learning Disabilities* 37, no. 1 (2004): 32-41, <https://doi.org/10.1177/00222194040370010401>.

²⁸ Sri Juidani, "Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 9 (2010): 280, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i9.519>; Darmiyati Zuchdi, Zuhdan Kun Prasetya, and Muhsinatun Siasah Masruri, "Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Bidang Studi Di Sekolah Dasar" 1, no. 3 (2010): 1-12, <https://doi.org/10.21831/cp.v1i3.224>.

Pada jenjang sekolah dasar, dilaksanakan pada kelas 4, pada jenjang SMP akan dilaksanakan pada kelas 9, dan pada jenjang SMA akan dilaksanakan pada kelas 11. Hal ini dilakukan dengan berbagai tujuan, yang pertama adalah agar masih ada waktu bagi sekolah untuk memperbaiki hasil tes sampai nilai benar-benar mencapai minimum. Kedua, agar asesmen ini tidak digunakan sebagai alat seleksi siswa yang dapat menimbulkan stress dan kecemasan berlebihan pada anak dan orang tua akibat ujian tersebut.

2. Implikasi AKM Dan Survei Karakter terhadap Tata Kelola Pembelajaran SD

Dari hasil analisa diatas maka perlu adanya perbaikan tata kelola pada pembelajaran di sekolah dasar. Kualitas pendidikan sekolah akan dapat dicapai melalui manajemen atau tata kelola pembelajaran yang baik yang bersifat holistik. Empat *frame* yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi suatu organisasi, yaitu struktur, politik, sumber daya manusia dan simbolik.²⁹ Keempat *frame* tersebut dapat digunakan sebagai dasar melakukan perbaikan tata kelola pembelajaran. Fokus utama dalam pembelajaran adalah sumberdaya manusia yaitu kepala sekolah yang berperan sebagai *leadership* dan guru sebagai unsur pembelajar. Dalam hal ini, peran kepala sekolah dan guru sangat

penting dalam proses pendidikan. Karena proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.³⁰

Tata kelola pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian serta tindak lanjut penilaian hasil pembelajaran.³¹ Dalam proses pembelajaran dimulai dari perencanaan hingga tindak lanjut penilaian harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi peserta didik. Pada pelaksanaan pembelajaran meliputi bagaimana guru membuka pelajaran, menyajikan pelajaran, penggunaan metode, pemanfaatan media, menyimpulkan pelajaran hingga pengelolaan kelas. Kaitannya dengan literasi dan numerasi, bagaimana guru menyajikan materi dan pemanfaatan media pembelajaran menjadi hal utama yang perlu adanya perbaikan. Pemanfaatan media pembelajaran yang relevan sangat dibutuhkan untuk menunjang kemampuan literasi peserta didik. Hal ini karena keterampilan dan pengetahuan profesional guru yang mampu memediasi interaksi dan memfasilitasi pengembangan respon kreatif siswa dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan pembelajaran di dalam kelas.³² Tata kelola pembelajaran harus dirancang yang menyenangkan sehingga

²⁹ Lee G Bolman and Terrence E Deal, *Reframing Organizations, Reframing Organizations*, 2017, <https://doi.org/10.1002/9781119281856>.

³⁰ Zaedun Na'im, "Konsep Dasar Dan Tata Kelola Manajemen Peserta Didik Di Sekolah," *Journal EVALUASI* 2, no. 2 (2018): 499, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i2.168>.

³¹ Maryani Abdullah, "Tata Kelola Pembelajaran," *Eklektika* 1, no. 2 (2013): 189–204.

³² Ruth Wood and Jean Ashfield, "The Use of the Interactive Whiteboard for Creative Teaching and Learning in Literacy and Mathematics: A Case Study," *British Journal of Educational Technology* 39, no. 1 (2008): 84–96,

dapat meningkatkan optimalisasi peserta didik dalam penguasaan materi.³³ Salah satunya adalah dengan strategi pembelajaran pemecahan masalah melalui soal dengan tipe *Higher Order Thinking Skill* (HOTS). Hal ini dengan pertimbangan bahwa literasi numerasi sangat berkaitan erat dengan pemecahan masalah matematika yang dapat menggali ide-ide matematika, memperkuat kemampuan pemahaman dan penalaran serta melatih ketekunan dan kreatifitas dalam penyelesaian.³⁴ Tentu kita dapat memodifikasi soal HOTS tersebut agar terintegrasi dengan nilai-nilai karakter tertentu.

Selanjutnya, pendidikan harus bersifat holistik dimana pendidikan harus dapat mengembangkan seluruh potensi atau kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara harmonis. Di mana kemampuan kognitif meliputi potensi intelektual, serta afektif dan psikomotorik meliputi potensi emosional, fisik, sosial dan estetika.³⁵ Secara sederhana, pendidikan holistik mengembangkan sekaligus aspek kognitif serta karakter peserta didik. Sehingga diharapkan dapat meng-cover literasi, numerasi serta karakter. Hal ini dinilai penting karena untuk mempersiapkan

anak-anak yang sukses di abad 21 maka perlu adanya pendidikan yang mengembangkan berbagai aspek, tidak hanya kognitifnya saja tetapi juga kepribadian, emosi, kemauan, kinestetik, sosial, spiritual, karakter dan kewarganegaraan.³⁶ Misalnya ketika guru memberikan pelajaran dengan numerasi dengan konteks keluarga maka di dalamnya harus ada nilai-nilai karakter yang dimunculkan. Membagi makanan secara adil kepada anggota keluarga, berbagi kepada saudara, dan rasa hormat kepada orang tua. Dengan cara seperti ini maka peserta didik akan merasa menemukan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak akan ada lagi anggapan matematika sebagai mata pelajaran yang menakutkan.

Apalagi di saat kondisi pandemi *covid-19* saat ini, ketika semua siswa harus belajar di rumah, namun keterampilan literasi dan numerasi serta karakter tetap dapat dikembangkan melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan internet. Misalkan keterampilan literasi dan numerasi dapat dimanfaatkan ketika kita membaca data banyaknya korban yang terkonfirmasi, pasien yang sembuh dan yang meninggal pada setiap negara, terutama di Indonesia.

<https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00703.x>

³³ Azhar Burhanuddin, "Tata Kelola Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan (Paikem) Di Sma Pondok Pesantren Immim Makassar," *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 34–51, <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4082>.

³⁴ Fitrianing Tyas and Puji Pangesti, "MENUMBUHKEMBANGKAN LITERASI" 5 (2018): 566–75.

³⁵ Herry Widyastono, "Muatan Pendidikan Holistik Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 18, no. 4 (2012): 467, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i4.102>.

³⁶ William Huit, "A Holistic View of Education and Schooling: Guiding Students to Develop Capacities, Acquire Virtues, and Provide Service William," *Annual International Conference Sponsored by the Athens Institute for Education and Research (ATINER), May 24-27, Athens, Greece., 2011.*

Selain itu, protokol kesehatan yang menentukan jarak pada *physical distancing* juga merupakan kegiatan numerasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Penguatan nilai-nilai karakter juga dituntut dalam kondisi pandemi saat ini, rasa empati dan sikap berbagi kepada sesama menjadi nilai karakter yang dapat dikembangkan serta sikap patuh kepada peraturan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus *covid-19*.

Selain kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler juga perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Implementasi pendidikan karakter tidak hanya terintegrasi melalui mata pelajaran saja tetapi juga dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler.³⁷ Kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan siswa di luar jam pelajaran dengan tujuan agar siswa tetap melakukan kegiatan yang berpotensi untuk membentuk diri, menggali dan mengembangkan bakat³⁸ sehingga diharapkan melalui kegaitan ini siswa dapat mengembangkan nilai-nilai karakter.

Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran.

Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kegiatan supervisi terhadap kinerja guru.³⁹ Kontrol dan pengawasan terhadap guru menjadi tugas dan tanggungjawab kepala sekolah. Tentu hal ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepala sekolah merupakan titik tumpu pembelajaran yang berkualitas. Dengan demikian, sekolah diharapkan mampu mempersiapkan diri menghadapi kebijakan baru beserta dengan tantangannya.

SIMPULAN

Salah satu isu permasalahan dalam dunia pendidikan kita adalah UN. Banyak kritik yang muncul terkait dengan penyelenggaraan UN. Hingga pada akhir tahun 2019, Mendikbud mengeluarkan kebijakan merdeka belajar di mana salah satunya adalah terkait dengan UN. Untuk berikutnya UN akan diganti dengan AKM dan Survei Karakter. Penilaian tidak akan lagi didasarkan pada per mata pelajaran tetapi terdapat dua ranah kognitif yang dinilai yaitu literasi dan numerasi. Sedangkan untuk ranah afektif terdapat survei karakter.

Untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan tersebut maka,

³⁷ Angga Meifa Wiliandani, Bambang Budi Wiyono, and A. Yusuf Sobri, "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Humaniora (JPH)* 4, no. 3 (2016): 132-42, <https://doi.org/10.17977/JPH.V4I3.8214>.

³⁸ Yayan Inriyani, Wahjoedi Wahjoedi, and Sudarmiatiin Sudarmiatiin, "Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS," *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kerjasama Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud* 1 (2016):

1-7, <https://doi.org/http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/gtk/article/download/246/233>.

³⁹ Sarifudin, "Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 02, No. 01, Januari 2019" 2, no. 1 (2019); Euis Haryani, "Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembelajaran Untuk Mewujudkan Kinerja Guru," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 11 (2017): 77-87.

sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus mempersiapkan tata kelola pembelajaran yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian. Salah satunya adalah melalui pendidikan holistik di mana pendidikan harus dapat mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara harmonis yang meliputi potensi intelektual pada aspek kognitif, emosional, fisik, sosial dan estetika sebagai aspek afektif. Berikutnya adalah, pembelajaran melalui strategi pemecahan masalah dengan soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang dapat dimodifikasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya. Pembelajaran dengan berbasis pemecahan masalah ini dinilai dapat mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi siswa. Kemudian peran aktif kepala sekolah sebagai manajer yang memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan kegiatan supervisi terhadap kinerja guru juga sangat diperlukan. Melalui peran aktif kepala sekolah diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan AKM dan Survei Karakter, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perlu adanya sosialisasi terkait kebijakan AKM dan survei karakter ke berbagai satuan pendidikan Sekolah Dasar. Perbaikan pada tata kelola pembelajaran dinilai sangat penting. Untuk itu perlu banyaknya peningkatan dalam berbagai aspek yang mendukung tata kelola pembelajaran, antara lain peningkatan pengetahuan dan profesionalisme guru melalui berbagai pelatihan atau workshop, peningkatan

fungsi kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan keterlibatan peran orang tua dan masyarakat.

Selain itu, jika memang benar bahwa acuan pengembangan asesmen ini adalah sola PISA maka pola antara proses pembelajaran dan asesmennya harus dirumuskan dengan tepat agar keduanya saling berkesinambungan. Dari sini maka yang menjadi pokok penting pertimbangan pemerintah adalah bahwa guru yang sebelumnya ditunjuk oleh Puspendik yang diberikan tugas mengembangkan soal UN harus telah memiliki kompetensi dalam mengembangkan Asesmen Kompetensi Minimum nanti. Sehingga kembali lagi bahwa harus ada kerjasama dan keterlibatan yang positif dan mendukung antara pengembang asesmen dengan para guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Alberta Government. "Why Is Numeracy so Important?," 2013.
- Alexander, Nicola A. *Policy Analysis For Educational Leaders*. United State, 2009.
- Antasari, Indah Wijaya. "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Tahap Pembiasaan" 9, no. 1 (2017): 367-73.
- Bakry, Aminuddin. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* 2, no. April (2010): 1-13.
- Bolman, Lee G, and Terrence E Deal. *Reframing Organizations. Reframing Organizations*, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781119281856>.
- Burhanuddin, Azhar. "Tata Kelola Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan (Paikem) Di Sma Pondok Pesantren Immim

- Makassar." *Idaarrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 34–51. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i1.4082>.
- Deborah Stone. *Policy Paradox*. Third Edit. New York London: Norton & Company, 2012.
- Ginsburg, L, M Manly, and MJ Schmitt. "The Components of Numeracy. NCSALL Occasional Paper." *National Center for the Study of Adult ...*, no. December (2006).
- Goodwin, A. Lin. "Globalization and the Preparation of Quality Teachers: Rethinking Knowledge Domains for Teaching." *Teaching Education* 21, no. 1 (2010): 19–32. <https://doi.org/10.1080/10476210903466901>.
- Haryani, Euis. "Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembelajaran Untuk Mewujudkan Kinerja Guru." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 11 (2017): 77–87.
- Hidayah, L. "Implementasi Budaya Literasi Di Sekolah Dasar Melalui Optimalisasi Perpustakaan: Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri Di Surabaya." *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 1, no. 2 (2017): 48–58.
- Hidayah, Nurul. "Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik" 7, no. 1 (2013): 35–40. <https://doi.org/10.13170/jp.7.1.2053>.
- Hidayat, Muhammad Hilal, Imam Agus Basuki, and Sa Akbar. "Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, no. 2017 (2018): 810–17.
- Huitt, William. "A Holistic View of Education and Schooling: Guiding Students to Develop Capacities, Acquire Virtues, and Provide Service William." *Annual International Conference Sponsored by the Athens Institute for Education and Research (ATINER), May 24-27, Athens, Greece., 2011.*
- Inriyani, Yayan, Wahjoedi Wahjoedi, and Sudarmiatin Sudarmiatin. "Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kerjasama Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud* 1 (2016): 1–7. <https://doi.org/http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/gtk/article/download/246/233>.
- Jonas, Nicolas. "Numeracy Practices and Numeracy Skills among Adults." *OECD Education Working Paper No. 177*, no. 177 (2018). <https://doi.org/10.1787/8f19fc9f-en>.
- Judiani, Sri. "Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 9 (2010): 280. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i9.519>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Materi Pendukung Literasi Numerasi." *Gerakan Literasi Nasional* 53, no. 9 (2017): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar.'" *Www.Kemdikbud.Go.Id*, 2020, 2019–20.
- Ketut, Ni, and Srie Kusuma. "Dampak Pelaksanaan Ujian Nasional Terhadap Motivasi Belajar, Moral Siswa Dan Eksistensi Guru," no. 2 (2017): 77–87.
- Kraayenoord, Christina E. Van, and John

- Elkins. "Learning Difficulties in Numeracy in Australia." *Journal of Learning Disabilities* 37, no. 1 (2004): 32-41.
<https://doi.org/10.1177/00222194040370010401>.
- Maryani Abdullah. "Tata Kelola Pembelajaran." *Eklektika* 1, no. 2 (2013): 189-204.
- Melfianora. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur." *Studi Litelatur*, 2017, 1-3.
- Na'im, Zaedun. "Konsep Dasar Dan Tata Kelola Manajemen Peserta Didik Di Sekolah." *Journal EVALUASI* 2, no. 2 (2018): 499.
<https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i2.168>.
- Neill, Alex W. "The Essentials of Numeracy." *New Zealand Association for Research in Education*, no. 1973 (2001).
- Novarina, Gheanurma Ekahasta, and Anang Santoso. "Model Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, no. 2016 (2019): 1448-56.
- Sarifudin. "Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 02, No. 01, Januari 2019" 2, no. 1 (2019).
- Segers, Eliane, Tijs Kleemans, and Ludo Verhoeven. "Role of Parent Literacy and Numeracy Expectations and Activities in Predicting Early Numeracy Skills." *Mathematical Thinking and Learning* 17, no. 2-3 (2015): 219-36.
<https://doi.org/10.1080/10986065.2015.1016819>.
- Shoimah Nuzilatus, Retno. "Implementasi Gerakan Literasi Di Sekolah (Studi Kasus Di SDN Karah 1 Suarabaya)." *Jurnal Pendidikan Dasar Islam Mida* 1, no. 2 (2008).
- Silverius, Suke, Nurul Hidayah, Dampak Psikologi, D A N Persepsual, and Siswa Dalam. "Dampak Psikologi, Fisik, Dan Persepsual Siswa Dalam Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2010): 194.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.446>.
- Suyono. "Pembelajaran Efektif Dan Produktif Berbasis Literasi: Analisis Konteks, Prinsip, Dan Wujud Alternatif Strategi Implementasinya Di Sekolah." *Bahasa Dan Seni* 37, no. 2 (2009): 203-17.
- Suyono, Titik Harsiati, and Ika Sari Wulandari. "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Pada Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar." *Jippsd* 2, no. 1 (2014): 116-23.
- Tyas, Fitrianing, and Puji Pangesti. "MENUMBUHKEMBANGKAN LITERASI" 5 (2018): 566-75.
- UU Sisdiknas. "Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003.
- Widyastono, Herry. "Muatan Pendidikan Holistik Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 18, no. 4 (2012): 467.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i4.102>.
- Wiliandani, Angga Meifa, Bambang Budi Wiyono, and A. Yusuf Sobri. "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Humaniora (JPH)* 4, no. 3 (2016): 132-42.
<https://doi.org/10.17977/JPH.V4I3.8214>.
- Wood, Ruth, and Jean Ashfield. "The Use of the Interactive Whiteboard for Creative Teaching and Learning in Literacy and Mathematics: A Case Study." *British Journal of Educational Technology* 39, no. 1 (2008): 84-96.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00703.x>.
- Zuchdi, Darmiyati, Zuhdan Kun Prasetya,

and Muhsinatun Siasah Masruri.
“Pengembangan Model Pendidikan
Karakter Terintegrasi Dalam
Pembelajaran Bidang Studi Di
Sekolah Dasar” 1, no. 3 (2010): 1-12.
<https://doi.org/10.21831/cp.v1i3.224>.